



Judul : Minyak Goreng Kembali Langka : Awasi Pasokan Minyak Sawit
Tanggal : Sabtu, 04 Februari 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Minyak Goreng Kembali Langka

Awasi Pasokan Minyak Sawit

Kelangkaan minyak goreng kembali terjadi. Harganya juga merangkak naik. Di pasar, harga Minyakita dijual di atas Rp 16 ribu per liter. Padahal Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng curah atau bersubsidi Rp 14 ribu per liter.

ANGGOTA Komisi VI DPR Amin Ak heran kelangkaan minyak goreng murah kembali terulang. Lagi-lagi masyarakat menengah bawah, terutama pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menjadi korbannya.

Padahal masalahnya klasik, yakni berkurangnya pasokan bahan baku berupa *Crude Palm Oil* (CPO).

"Kelangkaan pasokan CPO seharusnya tidak terjadi apabila pengusaha sawit mematuhi kewajiban penyediaan *Domestic Market Obligation* (DMO)," ujar Amin dalam keterangannya, kemarin.

Amin bilang, masyarakat berhak curiga jika pengawasan oleh Pemerintah terhadap kepatuhan pengusaha dalam memenuhi DMO 20 persen CPO tidak ber-

jalan. Pelaku usaha sawit menyetor DMO CPO sebesar 450 ribu ton per bulan. Kewajiban itu ada dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat.

Permasalahannya, apakah pengusaha betul-betul mematuhi ketentuan DMO 20 persen CPO? Kemudian apakah betul CPO tersebut dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri. Dalam artian, minyak goreng yang diproduksi itu betul-betul didistribusikan untuk kebutuhan dalam negeri.

"Saya melihat ada kelalaian Pemerintah dalam memonitor pasokan minyak sawit atau CPO," tegas dia.

Politikus PKS ini bilang, jika

aturan Permendag tersebut dilaksanakan dengan baik, pasokan CPO seharusnya lebih dari cukup. Bahkan, tersedia cadangan yang bisa digunakan jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan kebutuhan.

Adanya alasan pasokan CPO tersedot untuk program Biodiesel B35, menurutnya, tidak logis. Sebab, program biodiesel ditujukan menyerap kelebihan pasokan akibat larangan impor CPO Indonesia oleh negara-negara Uni Eropa.

"Kok aneh jika program biodiesel atau B35 menyedot CPO untuk minyak goreng rakyat, di tengah turunnya permintaan ekspor akibat larangan impor oleh Uni Eropa," kata dia.

Seharusnya, kata Amin, biodiesel diprioritaskan untuk menampung kelebihan produksi CPO non DMO. Karena itu, dia mendesak Pemerintah membuka hasil audit implementasi kepatuhan pengusaha dalam memenuhi DMO CPO.

"Audit secara konsisten pen-

ting untuk menjaga stabilitas dan pengendalian harga dan pasokan minyak goreng di dalam negeri."

Sementara, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, kelangkaan pada Minyakita disebabkan permintaan tinggi karena harganya terjangkau. Apalagi saat ini, Minyakita sudah masuk ke ritel modern.

"Minyakita itu terkenal sekarang. Semua orang kalau beli minyak goreng itu ya Minyakita. Rebutan dan jatah bahan bakunya di awal cuma 300 ribu ton, sehingga barangnya kurang," ujar Zulhas-sapaan Zulkifli Hasan di Jakarta, kemarin.

Dia menegaskan, para produsen minyak goreng tidak boleh menjual Minyakita di atas HET. Jika produsen melakukan kecurangan, akan dikenakan denda dan penalti sesuai dengan aturan Mendag.

Untuk mencegah kelangkaan Minyakita, Mendag melarang penjualan di *e-commerce* dan

ritel modern. Hanya bisa dijual di pasar tradisional. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi kelangkaan stok yang terjadi saat ini.

"Minyakita sangat digemari oleh kalangan masyarakat karena harganya yang terjangkau," kata dia.

Selain itu, Zulhas juga telah meminta pengusaha untuk meningkatkan produksi Minyakita menjadi sebesar 150 persen. Dengan demikian, produksi Minyakita menjadi 450 ribu ton per bulan dari rata-rata 300 ribu ton per bulan.

Dengan kebijakan itu, Ketua Umum DPP PAN ini memperkirakan Minyakita akan kembali membanjiri pasaran dengan harga normal dalam dua pekan ke depan.

"Bagi masyarakat yang membutuhkan minyak subsidi tersebut, bisa langsung mendatangi pasar-pasar tradisional terdekat yang dijual dengan harga normal Rp 14 ribu per liter," pungkasnya. ■ TIF